

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Ringkas Perusahaan

Panjangnya perjalanan penyediaan tenaga listrik di bumi Pasundan sejak dulu, kini dan esok hari disimbolkan secara kasat mata oleh sebuah bangunan tua peninggalan Belanda yang letaknya persis disisi sungai Cikapundung dan bersebelahan dengan gedung merdeka yang merupakan gedung tua tempat peserta Konferensi Asia Afrika digelar di Kota Bandung. Bangunan lawas hasil polesan arsitek Belanda, seakan menjadi saksi bisu sejarah kelistrikan di Tatar Parahyangan.

Awal kelistrikan di bumi parahyangan sudah ada sejak masa pemerintahan kolonial Belanda bercokol ditataran tanah Sunda. Pada tahun 1905 di Jawa Barat khususnya Kota Bandung berdiri perusahaan yang mengelola penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan public milik Pemerintah Kolonial Belanda yang bernama *Bandoengsche Electriciteit Maatschappij* (BEM). Dalam perjalanannya, tanggal 1 Januari 1920 BEM berubah menjadi perusahaan perseroan dengan nama *Gemeenschpplijk Electriciteit Bedrijf Voor Bandoeng* (GEBEO). Penggantian ini dikukuhkan dengan akte pendirian Notaris *Mr. Andriaan Hendrik Van Ophusein* dengan Nomor: 213 pada tanggal 31 Desember 1949.

Pasca Kemerdekaan RI, tahun 1957 merupakan awal penguasaan pengelolaan penyediaan tenaga listrik di seluruh tanah air yang ditangani langsung oleh Pemerintah Indonesia. Salah satunya ditandai dengan pengambilalihan GEBEO oleh Pemerintah

Indonesia tanggal 27 Desember 1957 yang kemudian dikukuhkan melalui Peraturan Pemerintah No.86 Tahun 1958 j.o. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1959.

Pada tahun 1961 dibentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN) sebagai wadah kesatuan pimpinan PLN melalui Peraturan Pemerintah No.67. Sejalan dengan itu, PLN Bandung pun berubah menjadi PLN Exploitasi XI sebagai kesatuan BPU-PLN di Jawa Barat, diluar DKI Jaya dan Tangerang. Sekitar tahun 1970, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara yang menjelaskan bahwa status PLN menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara. Mengacu pada pengumuman PLN Exploitasi No.05/DIII/Sek/1975 tanggal 14 Juli 1975, PLN Exploitasi XI diubah namanya menjadi Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jawa Barat. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.23 Tahun 1994 tanggal 16 Juni 1994, Badan Hukum PLN mengalami perubahan dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Perubahan itu turut mengubah nama Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat menjadi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat sejak tanggal 30 Juli 1994.

Untuk memenuhi tuntutan perubahan dan perkembangan kelistrikan yang dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, maka keluarlah Keputusan Direksi PT. PLN APD No.28.K/010/DIR/2001 tanggal 20 Februari 2001 yang menjadi landasan hokum perubahan nama PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat diubah menjadi PT PLN APD Jabar dan Banten.

Keputusan Direksi PT PLN APD No. 120.K/010/DIP/2002 tanggal 27 Agustus 2002, PT PLN APD Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat berubah lagi namanya menjadi PT PLN APD Kantor Distribusi & Area Pengatur Distribusi Jawa Barat hingga saat ini yang masih menempati bangunan lawas bernilai sejarah yang beralamat di JL. Asia Afrika No.63 Bandung dan Jl. Dr. Ir.Sukarno No.3 Bandung.

Seluruh pulau Jawa yang menyerap hampir 80% volume penjualan tenaga listrik seluruh Indonesia dikelola oleh empat PLN distribusi yang berfungsi sebagai unit koordinatif. Salah satu distribusi tersebut adalah PT PLN APD Jabar dan Banten yang memiliki wilayah kerja meliputi seluruh Jawa Barat. Luas wilayah kerja PT PLN APD Jabar dan Banten menjangkau lebih dari 42.196 km² yang meliputi Propinsi Jawa Barat kecuali Tangerang. Wilayah dan beban kerja yang sedemikian besarnya, dikelola oleh Unit-unit Pelaksana Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) dan Area Pengatur Distribusi (APD), dengan komposisi sebagai berikut :

- Area Pelayanan Jaringan (APJ) : 15 Unit
- Area Pengatur Distribusi (APD) : 1 Unit
- Unit Pelayanan dan Jaringan (UPJ) : 90 Unit
- Unit Pelayanan dan Jaringan Prima (UPJ Prima) : 7 Unit
- Kantor Pelayanan (KP) : 191 KP

Adapun Unit-unit Pelaksana tersebut adalah :

1. APD Bandung
2. APJ Bandung

3. APJ Bekasi
4. APJ Bogor
5. APJ Cianjur
6. APJ Cimahi
7. APJ Cirebon
8. APJ Depok
9. APJ Garut
10. APJ Karawang
11. APJ Majalaya
12. APJ Purwakarta
13. APJ Sukabumi
14. APJ Sumedang
15. APJ Tasikmalaya
16. APJ Gunung Putri

Fungsi masing-masing cabang tersebut adalah untuk mendistribusikan tenaga listrik kepada konsumen, membangun jaringan distribusi, pelayanan langganan dengan sistem pembendaharaan serta melaporkan kegiatannya dengan membuat laporan realisasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan PT PLN APD Jabar dan Banten.

2.1.1 Logo Perusahaan



Sumber: <http://www.pln.co.id/>

Gambar 2.1
Logo PT. PLN APD Jabar dan Banten

2.1.2 Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan

Visi

Visi dari PT. PLN (Persero) adalah “Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh kembang, Unggul dan Terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani.”

Misi

Sedangkan Misi dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat diantaranya adalah:

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

Tujuan

Tujuan dari perusahaan PT PLN APD Jawa Barat diantaranya adalah :

1. Mempercepat pemulihan pelayanan bagi konsumen-konsumen yang jaringannya terganggu.
2. Memperkecil kWh padam akibat gangguan atau pemeliharaan / pekerjaan.
3. Memantau performa jaringan untuk menyusun rencana perbaikan atau pengembangan sistem dimasa yang akan datang.
4. Mengusahakan optimasi pembebanan jaringan untuk mendapatkan hasil pengusahaan yang optimum dan ekonomis.

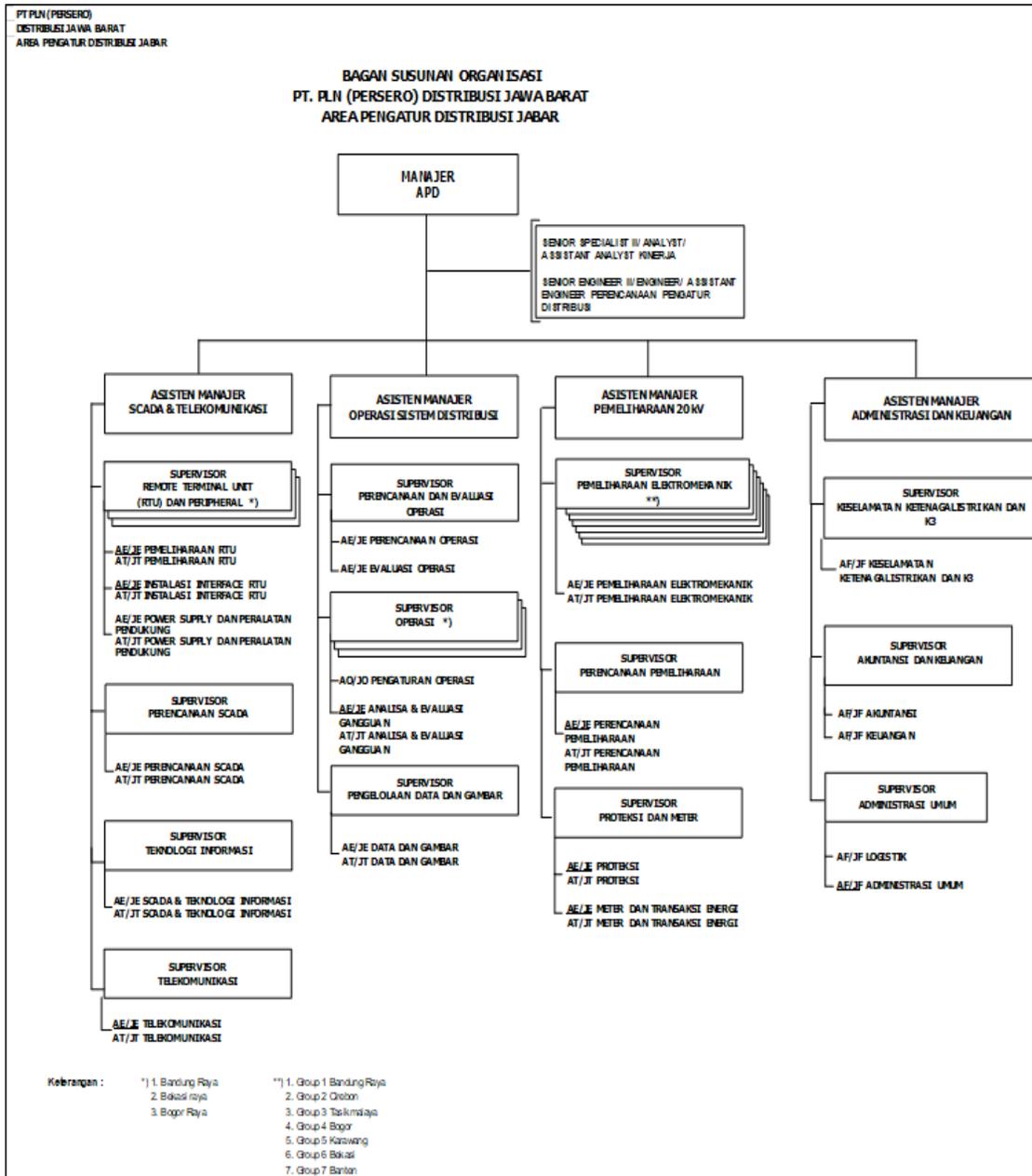
2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Sebuah perusahaan atau organisasi mempunyai struktur organisasi yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada seluruh anggotanya untuk mengetahui kegiatan atau pekerjaan yang harus dikerjakan.

PT.PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi Jawa Barat memiliki struktur organisasi bersifat fungsional, dimana Struktur organisasi fungsional juga memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah :

1. Profesionalisme atau keahlian yang lebih
2. Perusahaan lebih produktif
3. Mengurangi duplikasi penggunaan sumber daya yang terbatas
4. Memberikan kesempatan karir bagi para tenaga ahli spesialis
5. Memunculkan inovasi

Bagan organisasi dari PT.PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi Jawa Barat dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Area Pengatur Distribusi

Masing masing jabatan atau posisi dalam struktur organisasi di PT. PLN APD memiliki tugas dan wewenang masing masing Berikut Berikut adalah wewenang masing masing posisi atau jabatan:

1. Manajer Area

Kinerja Utama: Rasio Operasi, Susut Kepuasan pelanggan dan Citra perusahaan, disamping kinerja unit lainnya.

- a. Mensinergikan seluruh APJ dalam mengoptimalkan sumberdaya dan kemitraan untuk memaksimalkan Kinerja Unit dan Citra perusahaan berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku, termasuk surat kuasa dan kebijakan General Manager, termasuk pengembangan sistem informasi terintegrasi dan "online".
- b. Menjalin komunikasi dan hubungan kerja internal dan eksternal yang efektif dan mengembangkan dan memberdayakan seluruh potensi SDM untuk meningkatkan budaya perusahaan (Integritas, Saling Percaya, Peduli dan Pembelajar) dan Good Corporate Governance (*Responsibility, Accountability, Fairness dan Transpancy*) disertai apresiasi dan pembinaan SDM.
- c. Berkoordinasi dengan unit P3B terkait, Unit Distribusi lain (bila ada) dan APD yang berbatasan.
- d. Melengkapi pengaturan lebih lanjut (yang belum diatur oleh kantor distribusi) melaksanakan monitoring dan evaluasi / audit internal.

2. Ahli

- a. Membuat rekomendasi solusi masalah dan konsep realistis untuk memaksimalkan kinerja Area Pengatur Distribusi.
- b. Melaksanakan kegiatan tertentu, bekerjasama dengan fungsi terkait, termasuk operasional lapangan, untuk memaksimalkan kinerja Area Pengatur Distribusi dengan persetujuan manajer atau asisten manajer yang bersangkutan.
- c. Bertanggung jawab kepada Manajer Area Pengatur Distribusi.

3. Bagian GI (Gardu Induk)

Gardu Induk adalah merupakan suatu pusat beban pada suatu daerah tertentu, dari Gardu Induk inilah disambung beban konsumen yang disambung melalui jaringan Distribusi, dan besarnya beban ini akan berubah-ubah sepanjang waktu, sehingga perubahan ini harus diimbangi dengan tenaga listrik yang dibangkitkan oleh pusat listrik yang tersambung pada sistem jaringan tegangan tinggi.

Kadangkala suatu Pusat Listrik tidak mampu mengimbangi beban pada suatu Gardu Induk sehingga perlu disalurkan tenaga listrik dari Pusat Listrik yang lainnya, dan juga harus tersambung dengan sistem jaringan transmisi ke Gardu Induk tersebut, inilah letak pentingnya suatu sistem interkoneksi dari beberapa Pusat Listrik dengan suatu jaringan transmisi beserta Gardu Induknya.

Apabila pengaturan pembebanan Pusat Listrik ini terlambat atau tidak dilaksanakan kemungkinannya adalah adanya penurunan frekuensi pada sistem bila daya yang dibangkitkan kurang dari daya yang dibutuhkan beban sistem atau

kemungkinan bisa terjadi pengurangan beban (pemadaman beban) dan begitu pula sebaliknya akan terjadi frekuensi yang lebih tinggi, apabila daya yang dibangkitkan lebih besar dari beban sistem.

Peralatan gardu Induk terdiri dari peralatan yang berada didalam maupun diluar, peralatan yang berada diluar yaitu serandang hubung (yang biasanya disebut Switchyard) tegangan tinggi sedangkan untuk yang didalam adalah panel control dan peralatan tegangan menengah.

Bagian ini bertugas mengelola fungsi operasi dan pemeliharaan gi sisi 20 kv, fungsi perencanaan dan perluasan sel 20 kv, dan fungsi sistem proteks. Terdiri dari:

1. Group Har 1 Bandung Raya
2. Group Har 2 Cirebon
3. Group Har 3 Tasik
4. Group Har 4 Bogor
5. Group Har 5 Karawang
6. Group Har 6 Banten
7. Group Har 7 Bekasi

Sementara fungsi Utama Asisten Manajer Gardu Induk adalah:

- a. Mengelola fungsi perusahaan, perluasan dan pemeliharaan Gardu Induk, fungsi rele dan meter bekerjasama dengan Ahli dan fungsi terkait di APD untuk memaksimalkan kinerja APD.
- b. Mengkoordinasikan pemanfaatan anggaran bersama Asisten Manajer Scada dan Teknologi Informasi, Asisten Manajer Operasi Sistem Distribusi, Asisten Manajer

Keuangan dan Administrasi, Ahli, fungsi terkait APD untuk memaksimalkan kinerja APD dan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat.

4. Bagian Operasi (Data Aset GFD, Data Aset Mobil Deteksi)

Merupakan bagian yang bertugas mengelola fungsi perencanaan dan pengaturan operasi distribusi, data perusahaan jaringan dan gambar Jaringan Tegangan Menengah, serta mengkoordinasikan pengoperasian mobil deteksi Jaringan Tegangan Menengah. Terdiri dari :

- Supervisor Perencanaan Membuat rencana kerja pemeliharaan GI sisi 20 kV dan melakukan rekonfigurasi jaringan.
- Supervisor Operasi Melakukan pengaturan Operasi Sistem Distribusi 20 kV dan pengaturan mobil deteksi gangguan kabel. Supervisor Data Perusahaan Jaringan Melakukan pemutakhiran data perusahaan, gambar jaringan distribusi 20 kV.

5. Bagian Operasi dipimpin oleh seorang Asisten Manajer Operasi. Fungsi Utama Asisten Manajer Operasi adalah :

- Mengelola fungsi perencanaan operasi distribusi, pengaturan operasi distribusi, perusahaan operasi distribusi, serta mengkoordinasikan pengoperasian mobil deteksi JTM, fungsi perusahaan jaringan dan gambar bekerjasama dengan Ahli dan fungsi terkait APD untuk memaksimalkan kinerja APD.

- Mengkoordinasi pemanfaatan anggaran bersama Asisten Manajer Scada dan Teknologi Informasi, Asisten Manajer Keuangan dan SDM, Asisten Manajer Gardu Induk, Ahli, fungsi terkait di APD untuk memaksimalkan kinerja APD dan Distribusi Jawa Barat, khususnya penekanan susut dan tunggakan, antara lain upaya Unit Gardu Depan untuk program gardu sisipan (sekaligus untuk perbaikan tegangan dan pemasaran), program analisis susut per penyulang \dan per gardu dan program pengurangan tagihan listrik akibat TPM tidak terpenuhi, program kehumasan, apresiasi dan promosi pegawai dan lain-lain.

6. Bagian SDM

Terdiri dari SDM, Kesekretariatan dan Logistik. Bagian administarsi SDM, ini bertugas mengatur kesejahteraan pegawai, absensi tunjangan tahunan pegawai, tunjangan persemester yang dihitung berdasarkan jumlah jam kerja tiap semester (IKS), THR dan bonus prestasi unit. Kemudian perihal surat-menyurat, SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas), Kerumahtanggan/ Kesekretariatan dan Humas ditangani oleh bagian Kesekretariatan. Bagian Logistik berperan dalam pengaturan masuk keluarnya barang dari atau ke Gudang. SDM dipimpin oleh seorang Asisten Manajer Sumber Daya Manusia.

Fungsi Utama Asisten Manajer SDM adalah:

1. Mengelola fungsi SDM, fungsi administrasi, hukum dan komunikasi, logistik, bekerjasama dengan ahli dan fungsi terkait di APD, untuk memfasilitasi unit garis depan dalam memaksimalkan kinerjanya.
2. Mengkoordinasi apresiasi dan promosi kehumasan, pengembangan sarana dan lain - lain.

7. Bagian Keuangan

Bagian ini bertugas mengelola fungsi keuangan, dan fungsi administrasi, hukum dan komunikasi. Dipimpin oleh seorang Asisten Manajer Keuangan. Terdiri dari :

- a. Bagian Pengendalian Anggaran Keuangan
- b. Bagian Akuntansi

Fungsi Utama Asisten Manajer Keuangan adalah:

- a. Mengelola fungsi keuangan, bekerjasama dengan Asisten Manajer Scada dan Teknologi Informasi, Asisten manajer Operasi Sistem Distribusi, Asisten manajer gardu Induk, Asisten manajer SDM, Ahli dan fungsi terkait di APD, untuk memfalisitisai unit garis depan dalam memaksimalkan kinerjanya.
- b. Mengkoordinasikan penyediaan likuiditas operasional apresiasi dan promosi pegawai, dan lain-lain.

8. Bagian K2 & K3

Program K3 merupakan suatu rencana kerja dan pelaksanaan prosedur yang memfasilitasi pelaksanaan keselamatan kerja dan proses pengendalian resiko dan paparan bahaya termasuk kesalahan manusia dalam tindakan tidak aman, meliputi :

- a. Program untuk mendeteksi, mengkoreksi, mengontrol kondisi berbahaya, lingkungan beracun dan bahaya-bahaya kesehatan.
- b. Membuat prosedur keamanan
- c. Menindak lanjuti program kesehatan untuk pembelian dan pemasangan peralatan baru dan untuk pembelian dan penyimpanan bahan berbahaya.
- d. Pemeliharaan sistem pencatatan kecelakaan agar tetap waspada
- e. Pelatihan K3 untuk semua level manajemen.
- f. Rapat bulanan P2K3.